

**HUBUNGAN SOSIAL EKONOMI, TINGKAT PENDIDIKAN DENGAN
KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN PREMI BPJS KESEHATAN OLEH
PESERTA BPJS KESEHATAN MANDIRI DI PUSKESMAS
MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO**

Indah Christiana¹⁾, Masroni²⁾ dan Endah Wahyuning Tyas³⁾

1) Dosen Prodi D3 Kebidanan, STIKES Banyuwangi, email: indahchristiana@yahoo.co.id

2) Dosen Prodi S1 Keperawatan, STIKES Banyuwangi, email: masroni86@gmail.com

3. Mahasiswa Prodi S1 Keperawatan, STIKES Banyuwangi

ABSTRAK

Kepatuhan adalah perubahan perilaku yang mentaati peraturan. Kepatuhan dipengaruhi oleh sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sosial ekonomi, tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar premi BPJS Kesehatan Mandiri.

Penelitian ini berjenis *observasional analitik* dengan desain *cross sectional study*. Populasi 128 responden, sampel yang diambil 97 responden yang merupakan peserta BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Mlandingan tahun 2016. *Variabel dependen* kepatuhan *Variabel independen* sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Teknik sampling dengan *Cluster Sampling*. Analisa data dengan uji statistik *Rank Spearman* dan *Regresi Logistik Ordinal* dengan program SPSS 16.0

Hasil penelitian, kurang dari 50% responden kategori tingkat sosial ekonomi rendah dengan ketidakpatuhan membayar iuran premi 42 responden (43,3%). Kategori tingkat pendidikan tinggi dengan ketidakpatuhan membayar iuran premi 24 responden (24,7%). Data diolah menggunakan SPSS 16.0 untuk analisa *bivariat* dengan uji *Rank Spearman* dapat disimpulkan bahwa variable sosial ekonomi Sig.(2-tailed) 0,694 > 0,05. Maka Ho diterima Ha ditolak, Variabel tingkat pendidikan Sig.(2-tailed) 0,349 > 0,05. Maka Ho diterima Ha ditolak, Untuk analisa multivariat menggunakan uji *Regresi Logistik Ordinal*, didapatkan hasil Sig.(p-value) sosial ekonomi 0,445 > α ($\alpha = 5\%$) dan tingkat pendidikan Sig.(p-value) 0,152 > α ($\alpha = 5\%$).

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi dan tingkat pendidikan tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan.

Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan peserta BPJS Kesehatan dalam membayar iuran premi agar program pemerintah ini berhasil.

Kata Kunci: *Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan*

PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yaitu bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya adalah untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (TNP2K, 2015).

Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial (UU SJSN, 2014).

Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak awal tahun 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (TNP2K, 2015)

Data kepesertaan BPJS, hingga bulan Januari 2015, di seluruh wilayah Indonesia, terdapat 135,7 juta peserta. Mereka terdiri dari 86,4 juta peserta penerima bantuan iuran, 8,89 juta peserta dari Jamkesda, 11 juta peserta berasal dari golongan pekerja penerima upah (masyarakat yang pembayarannya dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja), dan 9,8 juta peserta berasal dari peserta mandiri atau penerima upah bukan pekerja di mana peserta sendiri yang membayarkan iuran yang bersangkutan (Irfan Humaidi, 2015).

Di region VII Jawa Timur sampai dengan akhir Februari 2015, jumlah peserta BPJS kesehatan mandiri sudah mencapai 121 ribu jiwa. Jumlah ini memang masih sangat kecil jika di banding dengan jumlah peserta BPJS yang ditanggung pemerintah, yaitu mencapai 14 juta jiwa (Kisworo Wati, 2015). Untuk wilayah Kabupaten Situbondo sampai bulan maret 2015 tercatat, jumlah keseluruhan peserta BPJS adalah 309.211 jiwa yang terbagi 251.822 jiwa peserta PBI dan 17.248 jiwa peserta non PBI yang 6.083 jiwa di dalamnya adalah peserta BPJS mandiri. Adapun di tingkat Kecamatan Mlandingan pada bulan Maret 2015, didapatkan data 10.437 jiwa merupakan peserta PBI dan peserta Non PBI sebanyak 1.042 yang di

dalamnya ada sekitar 546 orang peserta BPJS mandiri. (BPJS Regional Banyuwangi, 2015).

Banyaknya peserta BPJS mandiri yang mendaftar ternyata juga sepadan dengan jumlah peserta yang menunggak. Dari data BPJS Regional VII Jawa Timur tahun 2014, terdapat 30 persen peserta mandiri dinonaktifkan karena menunggak pembayaran BPJS kesehatan hingga enam bulan. Sedangkan untuk nasional hampir 55 persen peserta mandiri dinonaktifkan (BPJS Regional VII, 2014). Untuk wilayah kabupaten Situbondo dari 6.083 jiwa, sekitar 15 % diantaranya menunggak, termasuk didalamnya sekitar 20 % dari total peserta BPJS Mandiri Kecamatan Mlandingan juga menunggak (BPJS Regional Banyuwangi, 2015)

Hal ini tentu saja membawa dampak yang kurang bagus, baik untuk BPJS maupun untuk peserta itu sendiri. Karena dengan menunggak, pihak BPJS akan mengalami kesulitan dalam efisiensi dana. Untuk peserta mandiri, tunggakan pembayaran lebih disebabkan karena kurang memiliki niat yang tulus dari peserta untuk membayar tepat waktu (Benyamin Saud, 2015). Sedangkan Andriansyah (2015) menyebutkan, tunggakan tersebut terjadi karena kurang disiplin dan tingkat kepatuhan peserta masih rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diantaranya, tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi (Capernito, 2000).

Pemerintah menyelenggarakan program JKN dengan prinsip gotong royong, bertujuan untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat dengan akses kesehatan yang terjangkau dan bermutu, dimana yang sehat membantu

yang sakit. Namun faktanya kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program ini belum sepenuhnya bagus, dari data yang diperoleh, masih banyak yang menunggak pembayaran premi, hal ini salah satunya dilatar belakangi oleh tingkat sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, sebagian besar dari mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan namun sebagian besar juga merasa pembayaran premi memberatkan. Karena berdasarkan peraturan BPJS, seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga harus didaftarkan semua dan premi dibayar sesuai jumlah anggota keluarga. Bagi masyarakat dengan sosial ekonomi tinggi, hal ini bukanlah masalah bahkan lebih murah dibandingkan membayar premi asuransi komersial, namun bagi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah, bisa menjadi beban tersendiri. Selain itu, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum menyadari pentingnya pembayaran premi dikarenakan pengetahuan yang kurang dan hal ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang mereka miliki, sehingga mempengaruhi perilaku dalam mentaati peraturan. Hak dan kewajiban peserta BPJS masih perlu banyak dikaji lagi karena dengan mengikuti semua peraturan, maka pelayanan kesehatan bisa diakses dengan mudah dan ini sangat membantu dalam memelihara kesehatan kita, namun jika sebaliknya, program ini hanya terancam keberlangsungannya.

Permasalahan ini jika dibiarkan berlarut larut tentu akan mengganggu kestabilan program JKN. Karena itu Penulis mempunyai beberapa solusi yaitu pertama, perlu adanya tenaga khusus di tingkat desa untuk penarikan pembayaran premi yang selanjutnya disetorkan ke

Bank secara kolektif. Kedua, Perlu ada saldo rekening minimal 3 bulan yang menjadi syarat saat pendaftaran BPJS dan otomatis *autodebet* tiap bulannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *observasional analitik* dimana peneliti melakukan observasi tanpa perlakuan, dengan desain penelitian *cross sectional study* sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS kesehatan oleh peserta BPJS kesehatan mandiri di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo.

Populasi dalam penelitian ini adalah Semua Peserta BPJS Mandiri di Puskesmas Mlandingan terhitung dari bulan Agustus - September tahun 2016, sebanyak 128 peserta. Sampel dalam penelitian ini adalah Semua Peserta BPJS Mandiri di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mlandingan tahun 2016 yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 97 responden. Pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan *probability sampling* dengan teknik *cluster sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi dikelompokkan menjadi sub-sub populasi secara bergerombol (cluster) dari sub populasi selanjutnya dirinci lagi menjadi sub-populasi yang lebih kecil.

Variabel Independen (bebas) dalam penelitian ini adalah Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan. Variabel

Dependen (tergantung) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Membayar Premi BPJS. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan lembar kuesioner. Data dari masing – masing responden dikumpulkan dan dikelompokkan untuk mengetahui hubungan sosial ekonomi, tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS kesehatan oleh peserta BPJS mandiri di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mlandingan Situbondo. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah Pemeriksaan data (*Editing*), Pemberian Kode (*coding*), Pemberian Nilai (*scoring*), dan Tabulasi (*tabulating*). Analisis yang digunakan adalah Analisis Bivariat yang digunakan untuk mengetahui hubungan X1 dan Y, dan X2 dan Y, yang kemudian diuji dengan uji “*rank spearman*”, dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Pengambilan keputusan didasarkan pada angka signifikan / dikatakan signifikan apabila ρ (hasil uji) kurang dari α (0,05) atau H_0 ditolak, artinya ketiga variabel tidak saling bebas/ada hubungan (Sugiyono, 2007), dan Analisis Multivariat dengan analisis deskriptif yang menganalisis Variabel Tingkat Sosial Ekonomi dan Variabel Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan. Variabel penelitian ini diuji dengan uji “*regresi logistik ordinal*” yaitu suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel respon yang berskala ordinal.

HASIL

1. Data Umum

a. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

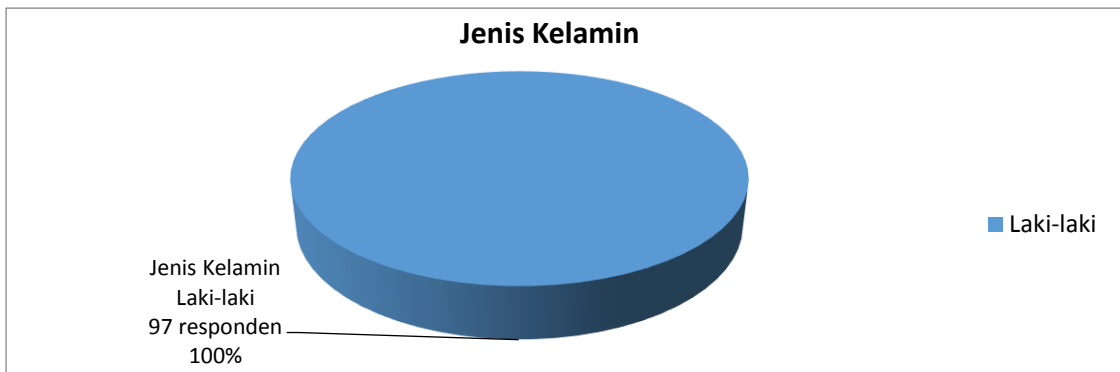


Diagram 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Peserta BPJS Kesehatan Mandiri

Berdasarkan diagram 1 di atas dapat diketahui bahwa seluruh responden

berjenis kelamin laki-laki, yakni 97 responden (100%).

b. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

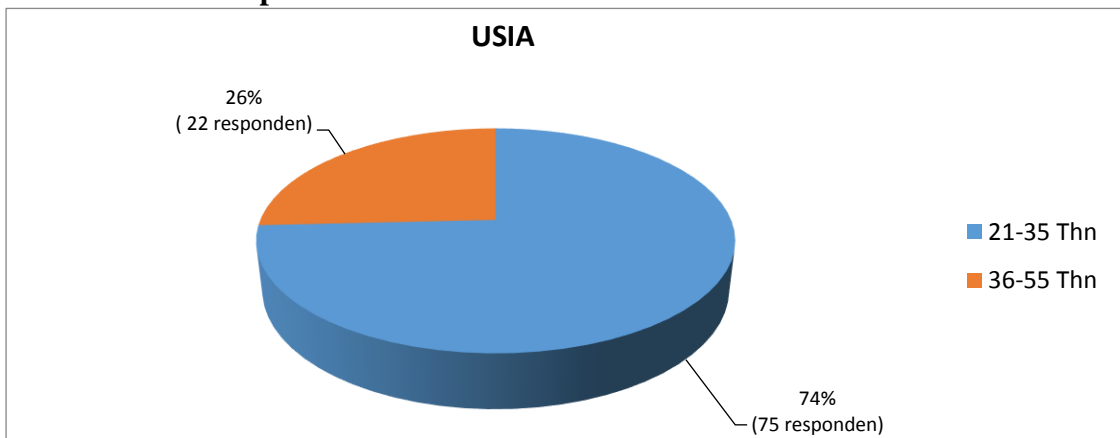


Diagram 2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia Peserta BPJS Kesehatan Mandiri

Berdasarkan diagram 2 di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah

responden berusia antara 21-35 tahun yaitu 75 responden (74%).

c. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

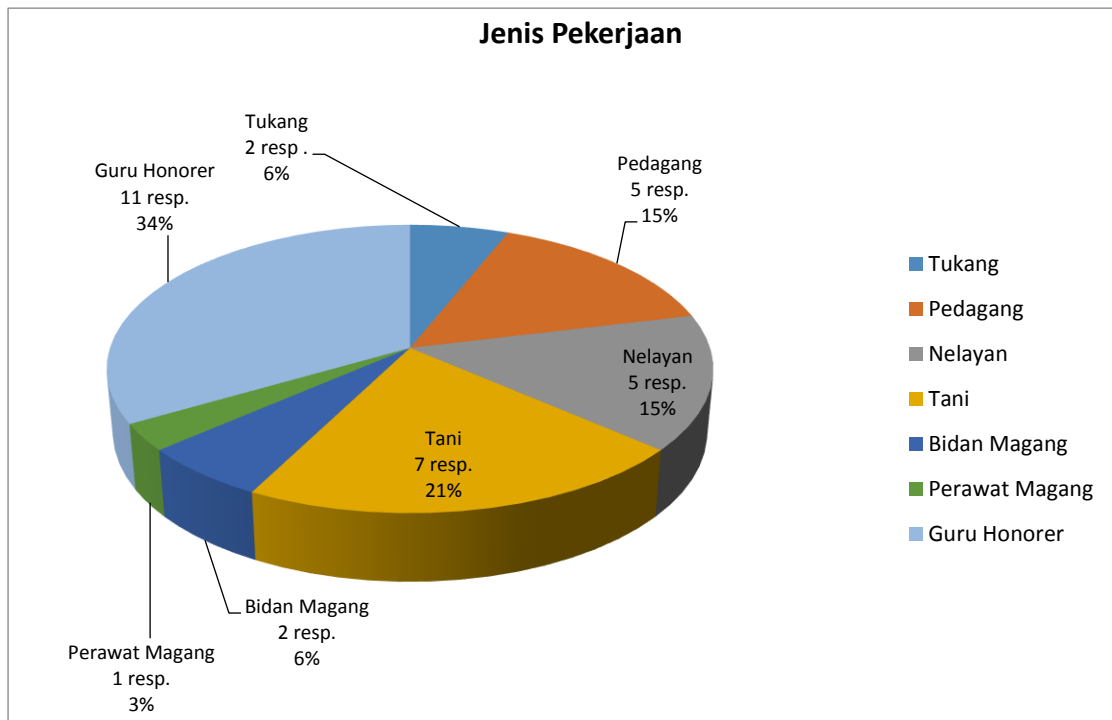


Diagram 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri

Berdasarkan diagram 3 di atas dapat diketahui bahwa kurang dari setengah responden memiliki jenis

pekerjaan sebagai guru honorer, yaitu 33 responden (34%).

d. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Dalam Satu KK

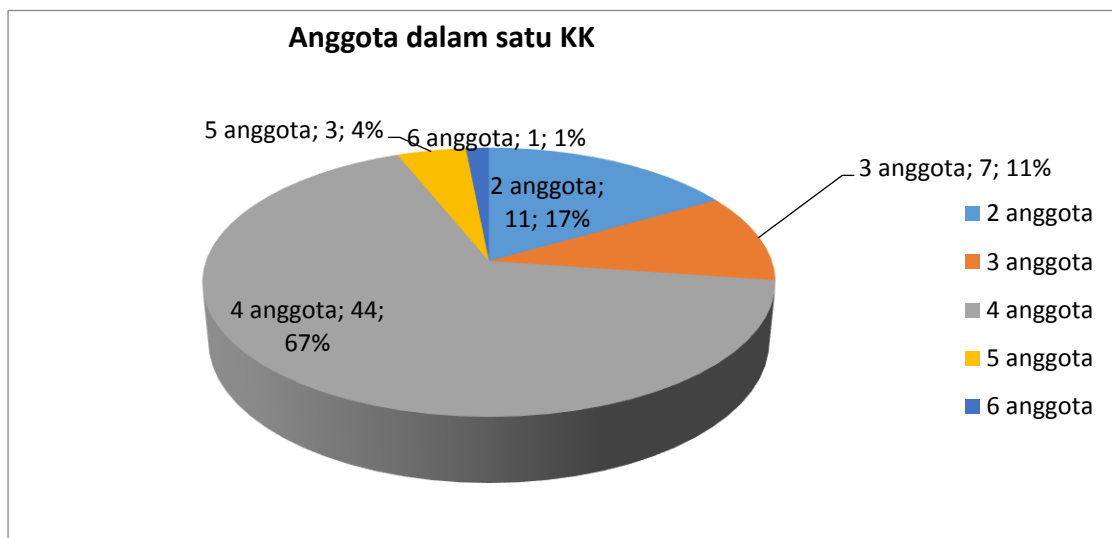


Diagram 4. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah anggota keluarga dalam satu KK Peserta BPJS Kesehatan Mandiri

Diagram 4 di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah responden

dalam satu KK beranggotakan 4 orang yakni 65 responden (67%).

e. Distribusi Responden Berdasarkan Besaran Premi

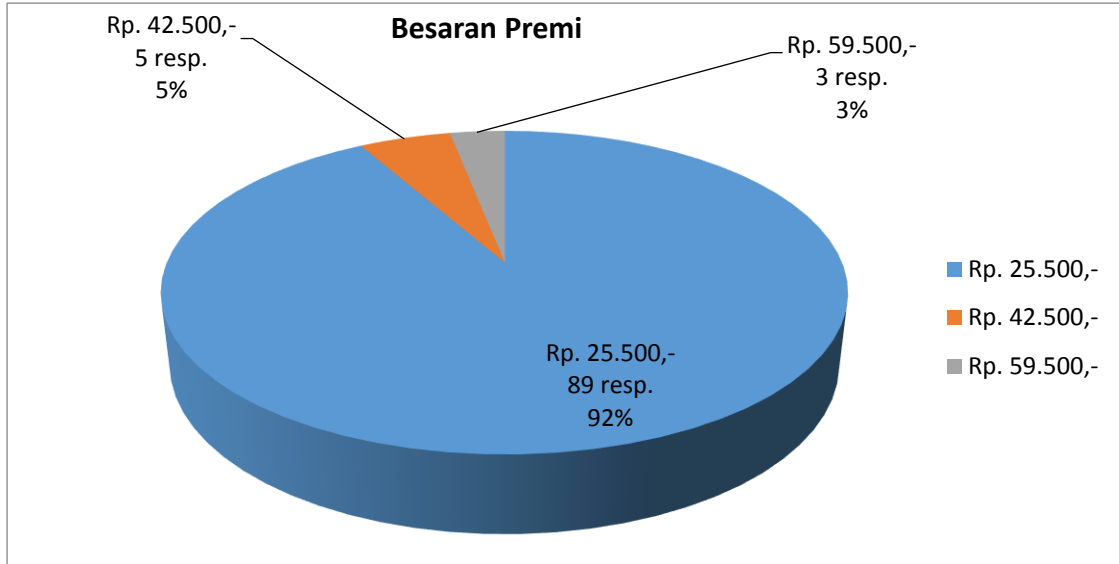


Diagram 5. Distribusi Responden Berdasarkan Besaran Premi yang Harus Dibayar Oleh Peserta BPJS Kesehatan Mandiri

Berdasarkan diagram 5 di atas dapat diketahui bahwa hampir seluruhnya responden membayar premi sebesar

Rp.25.500/Bulan/Org, yakni 89 responden (92%).

f. Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Rumah Ke Bank

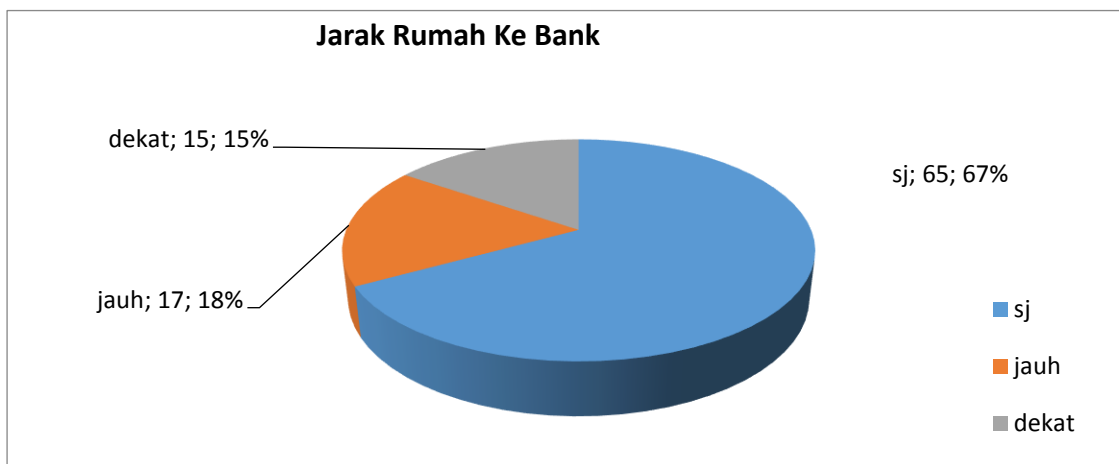


Diagram 6. Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Rumah Ke Bank Peserta BPJS Kesehatan Mandiri

Diagram 6 di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah responden jarak rumahnya jauh dari Bank tempat

membayar premi, yakni 65 responden (67%).

g. Distribusi Responden Berdasarkan Surat Teguran Tunggalan

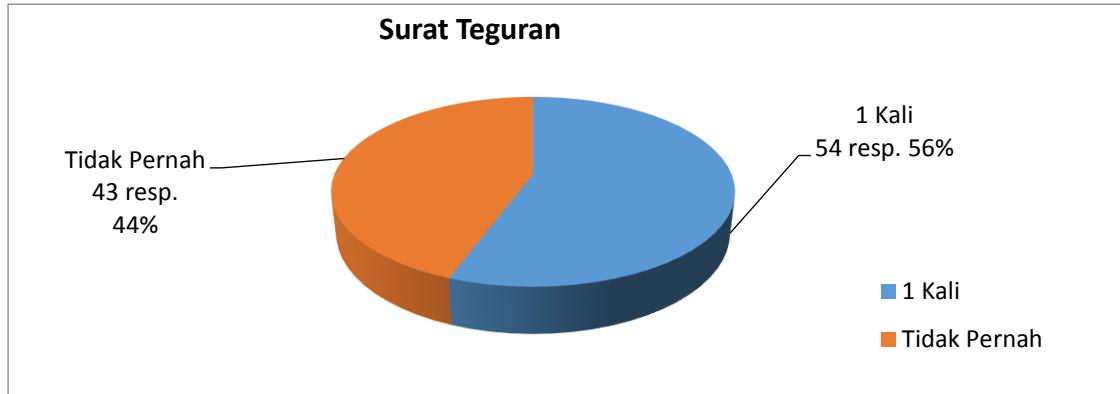


Diagram 7. Distribusi Responden Berdasarkan Surat Teguran yang Dilayangkan Kepada Peserta BPJS Kesehatan Mandiri

Berdasarkan diagram 7 di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah responden pernah menerima surat teguran

sebanyak 1 kali yakni 54 responden (56%).

h. Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Pembayaran Premi

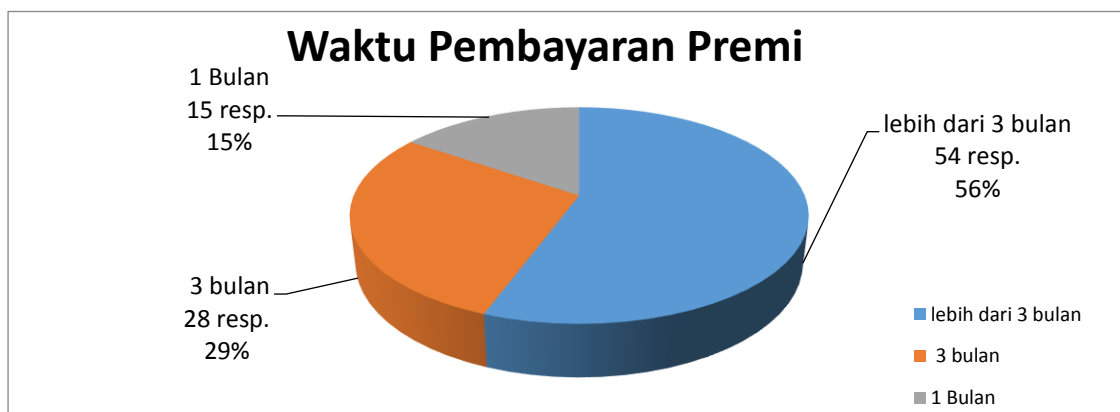


Diagram 8. Distribusi Responden Berdasarkan Ketepatan Waktu Pembayaran Premi Oleh Peserta BPJS Kesehatan Mandiri

Berdasarkan diagram 8 di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah responden membayar premi BPJS

Kesehatan Mandiri di atas 3 bulan, yakni 54 responden (56%).

2. Data Khusus

a. Distribusi Tingkat Sosial Ekonomi Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Mlandingan

Tabel 1. Karakteristik reponden berdasarkan tingkat sosial ekonomi

No	Tingkat Ekonomi	Jumlah Responden (n)	Prosentase
1	Pendapatan Sangat Tinggi: > Rp 3,5 jt	0	0 %
2	Pendapatan Tinggi: Rp 2,5 jt - Rp 3,5 jt	0	0 %
3	Pendapatan Sedang: Rp 1,5 jt – Rp 2,5 jt	26	26,8 %
4	Pendapatan Rendah: < Rp 1,5 jt	71	73,2 %
Jumlah		97	100%

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa lebih dari setengah responden berstatus tingkat sosial ekonomi rendah, yaitu 71 responden (73,2%).

b. Distribusi Tingkat Pendidikan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Mlandingan

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tinggi (Diploma, Sarjana, Magister, Doktor)	42	43,3%
2	Menengah (SMA / SMK)	36	37,1%
3	Dasar (SMP/MTS/SD/MI)	19	19,6%
Jumlah		97	100%

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa kurang dari setengah responden berpendidikan tinggi, yaitu 42 responden (43,3%).

c. Distribusi Tingkat Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri dalam membayar iuran premi BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Mlandingan

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan tingkat kepatuhan dalam membayar iuran premi BPJS Kesehatan Mandiri

No	Tingkat Kepatuhan	Responden (n)	Prosentase
1	Patuh : membayar premi tiap bulan/tdk pernah nunggak	15	15,4 %
2	Kurang patuh : nunggak 1-3 bulan	28	28,9 %
3	Tidak Patuh : nunggak > 3 bulan	54	55,7 %
Jumlah		97	100 %

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah responden tidak patuh dalam membayar

iuran premi BPJS yaitu sebanyak 54 responden (55,7%).

d. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Mlandingan

Tabel 4. Hubungan tingkat sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan

Kepatuhan Tingkat SosEk	Kepatuhan		Kurang Patuh		Tidak Patuh		Total	
	Patuh	%	Patuh	%	Patuh	%	Total	%
Sangat Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0
Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedang	3	3,0	7	7,21	16	15,5	26	25,8
Rendah	12	12,4	21	18,5	38	43,3	71	74,2
Total	15	15,4	28	25,8	54	58,8	97	100

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi hubungan sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas

Mlandingan, untuk kategori tingkat sosial ekonomi rendah dengan ketidakpatuhan membayar iuran premi BPJS sebanyak 42 responden (43,3%).

e. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas

Tabel 5. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Mlandingan

Kepatuhan Tingkat Pendidikan	Kepatuhan		Kurang Patuh		Tidak Patuh		Total	
	Patuh	%	Patuh	%	Patuh	%	Total	%
Tinggi	6	6,20	12	12,4	24	24,7	42	43,3
Menengah	5	5,15	8	8,24	23	23,7	36	37,1
Dasar	4	4,12	8	8,24	7	7,21	19	19,6
Total	15	15,5	28	28,9	54	55,7	97	100

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas

Mlandingan, untuk kategori tingkat pendidikan tinggi dengan ketidakpatuhan membayar iuran premi BPJS sebanyak 24 responden (24,7%).

3. Uji Statistik Menggunakan SPSS 16.0

a. Uji Rank Spearman Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan

Correlations

			SOSEK	KEPTHN
Spearman's rho	SOSEK	Correlation Coef ficient	1,000	-,040
		Sig. (2-tailed)	.	,694
		N	97	97
	KEPTHN	Correlation Coef ficient	-,040	1,000
		Sig. (2-tailed)	,694	.
		N	97	97

Dari uji statistik terlihat nilai Sig.(2-tailed) 0,694 >0,05. Maka H_0 diterima H_a ditolak, berarti tidak ada hubungan antara tingkat sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja

Puskesmas Mlandingan.

Dari hasil keeratan korelasi diperoleh hasil ($r = 0,040$), dimana angka tersebut berada pada korelasi 0,00 - 0,199 yang artinya tidak ada korelasi antara tingkat sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar premi BPJS Kesehatan.

b. Uji Rank Spearman Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan

Correlations

			PENDDKN	KEPTHN
Spearman's rho	PENDDKN	Correlation Coef ficient	1,000	-,096
		Sig. (2-tailed)	.	,349
		N	97	97
	KEPTHN	Correlation Coef ficient	-,096	1,000
		Sig. (2-tailed)	,349	.
		N	97	97

Dari uji statistik terlihat nilai Sig.(2-tailed) 0,349 >0,05. Maka H_0 diterima H_a ditolak, berarti tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan olehpeserta BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah

kerja Puskesmas Mlandingan.

Dari hasil keeratan korelasi diperoleh hasil ($r = 0,096$), dimana angka tersebut berada pada korelasi 0,00 - 0,199 yang artinya tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar premi BPJS Kesehatan.

c. Uji Regresi Logistik Ordinal Hubungan Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan

Case Processing Summary

		N	Marginal Percentage
kepathn	1	54	55.7%
	2	28	28.9%
	3	15	15.5%
sosek	1	71	73.2%
	2	26	26.8%
penddkn	1	19	19.6%
	2	36	37.1%
	3	42	43.3%
Valid		97	100.0%
Missing		0	
Total		97	

Dari *Case Processing Summary* di atas diketahui sebanyak 54 responden tidak patuh membayar premi (55,7%), responden yang berstatus sosial ekonomi

rendah 71 responden (73,2%) dan responden yang tingkat pendidikannya tinggi sebanyak 42 responden (43,3%). Semua data valid digunakan (100%).

Model Fitting Information

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	41.163			
Final	37.456	3.707	3	.295

Link function: Logit.

Berdasarkan *Model Fitting Information* diketahui bahwa p-valuenya 0,295 ($p\text{-value} > 0,05$, dimana output ini didasarkan pada hipotesis bahwa H_0 adalah Model yang hanya mengandung

intercept cocok digunakan dan H_a adalah Model yang hanya mengandung *intercept* tidak cocok digunakan. Keputusan: Terima H_0 , yaitu model yang hanya menggunakan *intercept* cocok digunakan.

Goodness-of-Fit

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	5.713	7	.574
Deviance	7.446	7	.384

Link function: Logit.

Goodness model untuk menguji hipotesis, H_0 model cocok vs H_a model tidak cocok. Hasil di atas menunjukkan

nilai $\text{Sig}(p\text{-value}) > \alpha$ ($\alpha=5\%$) sehingga H_0 diterima yang artinya model *regresi* cocok untuk penelitian ini.

Pseudo R-Square

Cox and Snell	.037
Nagelkerke	.044
McFadden	.020

Link function: Logit.

Adapun berdasarkan hasil dari *Pseudo R Square* didapatkan nilai *Nagelkerke* sebesar 4,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel sosial ekonomi dan tingkat pendidikan mampu

menjelaskan kepatuhan responden membayar premi hanya sebesar 4,4%. Nilai ini memang kecil, dimungkinkan karena variabel independen yang digunakan hanya dua.

Parameter Estimates

	Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Threshold [patuhan = 1,00]	.553	.465	1.410	1	.235	-.359	1.465
[patuhan = 2,00]	2.072	.516	16.092	1	.000	1.059	3.084
Location [sosek=1,00]	.355	.465	.583	1	.445	-.557	1.267
[sosek=2,00]	0 ^a			0			
[pendidikan=1,00]	.759	.530	2.049	1	.152	-.280	1.797
[pendidikan=2,00]	-.262	.454	.333	1	.564	-1.152	.628
[pendidikan=3,00]	0 ^a			0			

Link function: Logit.

a. This parameter is set to zero because it is redundant.

Pada *Parameter Estimate* dapat diketahui bahwa nilai Sig.(p-value) sosial ekonomi $0,445 > \alpha$ ($\alpha=5\%$), nilai Sig.(p-value) tingkat pendidikan $0,152 > \alpha$ ($\alpha=5\%$), dimana jika Sig.(p-value) $> \alpha$ maka, H_0 diterima sehingga dapat

disimpulkan bahwa baik dari segi sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan sama sama tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar premi BPJS Kesehatan.

Test of Parallel Lines^a

Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Null Hypothesis	37.456			
General	36.469	.987	3	.804

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) are the same across response categories.

a. Link function: Logit.

PEMBAHASAN

1. Sosial Ekonomi Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berstatus sosial ekonomi rendah, yaitu 71 responden (73,2%).

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi, sedangkan menurut Soekanto (2001) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

Dari data penelitian pada diagram 5.3 dapat diketahui bahwa sebagian kecil responden memiliki jenis pekerjaan sebagai guru honorer, yaitu 33 responden (34%). Jenis pekerjaan lainnya yang digeluti adalah petani dan nelayan. Tak satupun responden berada pada status ekonomi tinggi apalagi sangat tinggi. Letak geografis Kecamatan Mlandingan di sebelah utara berbatasan dengan laut dan dan sebelah selatan merupakan area pegunungan. Masyarakat di daerah ini memiliki kecenderungan untuk bekerja sebagai nelayan ataupun petani, yang mana mereka bisa mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Profesi guru honorer merupakan pekerjaan yang bergerak di bidang jasa dan masuk kategori pekerjaan yang berstatus sedang. Seperti kita ketahui, profesi ini membutuhkan profesionalisme

tinggi namun karena status kepegawaian belum tetap, maka pendapatan mereka masih dibawah UMR Kabupaten Situbondo.

2. Tingkat Pendidikan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian responden berpendidikan tinggi, yaitu 42 responden (43,3%). Responden dengan tingkat pendidikan sedang sebanyak 36 responden (37,1%) dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan tingkat dasar (19,6%).

Faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan menurut (Ahmadi, A. dan Uhbiyati, 2001) antara lain dipengaruhi usia, pekerjaan, status ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Dengan data sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan tinggi mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri menunjukkan bahwa dengan pendidikan yang baik, seseorang mampu mengambil keputusan yang tepat untuk keberlangsungan hidupnya, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan kesehatan.

3. Tingkat Kepatuhan Membayar Iuran Premi Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian responden tidak patuh dalam membayar iuran premi BPJS yaitu sebanyak 54 responden (55,7%) dan hanya sebagian kecil responden yakni 15 responden (15,4%) saja yang patuh.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan menurut (Capernito, 2000), antara lain karena kurangnya pemahaman instruksi, kadang-kadang hal ini disebabkan oleh kegagalan profesional kesalahan dalam memberikan informasi lengkap, penggunaan istilah-istilah asing, dan banyaknya instruksi yang harus di ingat.

Dalam hal ini, sepertinya sosialisasi kepesertaan BPJS haruslah lebih intens diberikan, mengingat ini merupakan program baru. Akan sangat disayangkan apabila kepesertaan sampai dinonaktifkan mengingat besarnya manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan.

4. Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi dengan Kepatuhan Membayar Premi oleh Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi hubungan sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Mlandingan tahun 2016, kurang dari 50% dengan kategori tingkat sosial ekonomi rendah dengan ketidakpatuhan membayar iuran premi BPJS sebanyak 42 responden (43,3%).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang adalah tingkat ekonomi (Power park C.E., 2002).Tingkat ekonomi merupakan kemampuan finansial untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, akan tetapi ada kalanya penderita sudah pensiun dan tidak bekerja namun biasanya ada sumber keuangan lain yang bisa digunakan untuk membiayai semua program pengobatan dan perawatan sehingga belum tentu

tingkat ekonomi menengah ke bawah akan mengalami ketidakpatuhan dan sebaliknya tingkat ekonomi baik tidak terjadi kepatuhan.

Berdasarkan hasil penelitian pada diagram 5.5 Besaran premi yang dibayarkan per bulan hampir seluruh responden, yakni 89 responden (92%) sebesar Rp 25.500,-. Sebenarnya hal ini terbilang murah mengingat manfaat fasilitas pelayanan kesehatan yang akan diterima. Tetapi akan menjadi cukup berat bila yang terdaftar sebagai anggota BPJS dalam satu KK melebihi 2 orang. Pada diagram 5.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki jumlah anggota keluarga dalam satu KK berjumlah 4 orang, yakni 65 responden (67%). Sejak 1 November 2014, ada perubahan peraturan dalam regulasi BPJS yang mewajibkan kepesertaan diikuti oleh seluruh anggota keluarga yang tertera dalam KK (Kartu Keluarga) dan tidak akan diterima jika hanya mendaftarkan seorang diri. Kurangnya sosialisasi dan keharusan mengikutsertakan seluruh anggota keluarga bisa menjadi hambatan seseorang memenuhi kewajibannya membayar premi, namun tidak menutup kemungkinan, seseorang dengan tingkat ekonomi rendah tetap patuh membayar karena mereka sadar akan manfaat kesehatan yang akan diterima ataupun terpaksa karena dalam kondisi sakit.

5. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Membayar Premi oleh Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar

iuran premi BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Mlandingan tahun 2016, untuk kategori tingkat pendidikan tinggi dengan ketidakpatuhan membayar iuran premi BPJS sebanyak 24 responden (24,7%).

Tingkat pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang aktif yang diperoleh secara mandiri, lewat tahapan-tahapan tertentu (Feuer Stein, 1986)

Teori di atas ternyata kurang tepat bagi responden yang kami teliti karena data mengatakan sebaliknya. Dari diagram 5.8 dapat kita ketahui bahwa sebagian responden yakni 54 responden (56%) membayar premi melewati batas toleransi yaitu di atas 3 bulan. Dengan prosentase yang sama, responden menerima surat teguran atas tunggakan premi BPJS.

6. Hubungan Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Membayar Premi Oleh Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo

Berdasarkan hasil uji statistik yang kami peroleh dengan menggunakan dua uji, untuk uji *bivariat*, kami menggunakan *Spearman Rank*, didapatkan hasil untuk sosial ekonomi Sig.(2-tailed) 0,694 >0,05. Maka H_0 diterima H_a ditolak, berarti tidak ada hubungan antara tingkat sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Mlandingan tahun 2016. Dan hasil keeratan korelasi diperoleh hasil ($r = 0,040$), dimana angka tersebut berada pada korelasi 0,00 - 0,199 yang artinya

tidak ada korelasi antara tingkat sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar premi BPJS Kesehatan. Untuk variabel tingkat pendidikan didapatkan nilai Sig.(2-tailed) 0,349 >0,05. Maka H_0 diterima H_a ditolak, berarti tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Mlandingan tahun 2016. Dari hasil keeratan korelasi diperoleh hasil ($r = 0,096$), dimana angka tersebut berada pada korelasi 0,00 - 0,199 yang artinya tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar premi BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk uji *multivariat*, kami menggunakan uji Regresi Logistik Ordinal dan diperoleh hasil nilai Sig.(p-value) sosial ekonomi 0,445 > α ($\alpha=5\%$), nilai Sig.(p-value) tingkat pendidikan 0,152 > α ($\alpha=5\%$), dimana jika Sig.(p-value) > α maka, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa baik dari segi sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan sama sama tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar premi BPJS Kesehatan.

Selain tingkat ekonomi, tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang (Capernito, 2000). Tetapi dari penelitian yang telah kami lakukan selain dua faktor di atas, ada hal lain yang mempengaruhi kepatuhan seseorang, khususnya responden kami yang mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri. Hal lain tersebut tertuang dalam diagram 5.6 yaitu dapat diketahui bahwa sebagian besar responden jarak rumahnya jauh dari Bank tempat membayar premi, yakni 65 responden (67%). Ternyata faktor

geografis juga ikut andil dalam mempengaruhi kepatuhan responden membayar premi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang Hubungan Sosial Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Premi BPJS Kesehatan Oleh Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Di Puskesmas Mlandingan Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Sebagian besar peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Situbondo tahun 2016 berstatus sosial ekonomi rendah yaitu 71 responden (73,2%); 2) Variabel diatas nantinya akan diuji dengan uji “*regresi logistik ordinal*” yaitu suatu analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel respon yang berskala ordinal; 3) Sebagian peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Situbondo tahun 2016 berpendidikan tinggi yaitu 42 responden (43,3%) 4) Sebagian peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Situbondo tahun 2016 tidak patuh dalam membayar iuran premi BPJS yaitu sebanyak 54 responden (55,7%); 5) Hubungan sosial ekonomi dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Mlandingan tahun 2016 oleh peserta BPJS Kesehatan Mandiri, kurang dari 50% masuk kategori tingkat sosial ekonomi rendah dengan ketidakpatuhan membayar iuran premi BPJS sebanyak 42 responden (43,3%); 6) Hubungan tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran premi BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Mlandingan

tahun 2016 oleh peserta BPJS Kesehatan Mandiri, masuk kategori tingkat pendidikan tinggi dengan ketidakpatuhan membayar iuran premi BPJS sebanyak 24 responden (24,7%); 7) Untuk uji *multivariat*, kami menggunakan uji *Regresi Logistik Ordinal* dan diperoleh hasil nilai Sig.(p-value) sosial ekonomi $0,445 > \alpha$ ($\alpha=5\%$), nilai Sig.(p-value) tingkat pendidikan $0,152 > \alpha$ ($\alpha=5\%$), dimana jika Sig.(p-value) $> \alpha$ maka, H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa baik dari segi sosial ekonomi maupun tingkat pendidikan sama sama tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan membayar premi BPJS Kesehatan oleh peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Puskesmas Mlandingan Situbondo.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih Eka Putri, 2014, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia
- Asih Eka Putri, 2014, *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia
- Asih Eka Putri, 2014, *Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia*, Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia
- Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, 2014, *Juknis JKN*
- Fajar, Agung, 2012, *Statistika 1, Jenis Metode Sampling*, <http://stoneagung.blogspot.com/2012/11/statistika-1-jenis-metode>

- sampling.html diakses 5 April 2016 pukul 16.00 WIB
- Handayani, Indah, 2015, *Akhir Tahun, Peserta BPJS Kesehatan Jadi 168 Juta*,
<http://www.beritasatu.com/kesehatan/253202-akhir-tahun-peserta-bpjs-kesehatan-jadi-168-juta.html> diakses 29 Maret 2016 pukul 16.17 WIB
- Jamkes Indonesia, 2015, *Bersiap menjadi peserta, ketentuan umum, masa berlaku*,http://jamkesindonesia.com/jkn/detail/masa_berlaku_kepesertaan#.V ViIhvBBLIU diakses 5 April 2016 pukul 19.00 WIB
- Jerniwati, 2011, *Hubungan Keadaan Sosial Ekonomi Terhadap Prestasi Belajar Siswa SD Negeri 7 Gandeng Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*https://docs.google.com/document/d/1WtG_x6jrAZlr8knZ2N_pWIMYKzdPzk-3bfROBKQUg4/edit diakses 5 April 2016 pukul 19.00 WIB
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nursalam, 2011, *Manajemen Keperawatan*, Penerbit Salemba Medika
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Suparyanto, 2010, *Konsep Kepatuhan*, <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2010/07/konsep-kepatuhan.html> diakses 5 April 2016 pukul 10.21 WIB
- Tim Berita Islami Masa Kini, 2015, *Cluster Sampling*, <http://beritaislamimasakini.com/teknik-pengambilan-sampel-cluster-sampling-pengambilan-sampel-kelompok.htm> diakses 5 April 2016 pukul 15.15 WIB
- Tim Jamsos Indonesia, 2014, *Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS*,<http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/268> diakses 5 April 2016 pukul 18.30 WIB
- Tim Sriwijaya Post, 2015, *Tunggak Bayar Premi, Kartu BPJS Kesehatan Tidak Berguna*,
<http://palembang.tribunnews.com/2014/11/06/tunggak-bayar-premi-kartu-bpjs-kesehatan-tidak-berguna> diakses 5 April 2016 pukul 16.10 WIB
- Tim TNP2K, 2014, *Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*,<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/> diakses 29 Maret 2016 pukul 20.03 WIB